



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

# MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,  
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
KOTA BANDA ACEH**

[mister@serambimekkah.ac.id](mailto:mister@serambimekkah.ac.id)

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology  
and Educational Research

# Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 523–529

## Perbandingan Penerapan Prinsip *Environmental, Social and Governance* dalam *Corporate Governance* di Indonesia dan Singapura

Rafif Nabil Protugus, Rikki Jitu Saputra, Yosef Suryo Wibowo

Universitas Negeri Semarang

### Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2484>

### How to Cite this Article

APA : Protugus, R. N., Saputra, R. J. ., & Wibowo, Y. S. (2024). Perbandingan Penerapan Prinsip Environmental, Social and Governance dalam Corporate Governance di Indonesia dan Singapura. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 523 – 529. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2484>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



## Perbandingan Penerapan Prinsip *Environmental, Social and Governance* dalam *Corporate Governance* di Indonesia dan Singapura

Rafif Nabil Protugus<sup>1</sup>, Rikki Jitu Saputra<sup>2</sup>, Yosef Suryo Wibowo<sup>3</sup>  
Universitas Negeri Semarang<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespondensi: [rnprotugus@students.unnes.ac.id](mailto:rnprotugus@students.unnes.ac.id)

Diterima: 04-12-2024

| Disetujui: 05-12-2024

| Diterbitkan: 06-12-2024

### ABSTRACT

*Comparison between the application of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in corporate governance in Singapore and Indonesia. In this study, a comparative analysis method was used to compare various aspects of ESG implementation in the two countries, including differences in regulatory frameworks and corporate awareness related to ESG, the role of government and regulation, challenges faced by companies, and factors influencing success. The results show that the regulatory framework and corporate awareness level in Singapore are better than in other countries. Nonetheless, the adoption of ESG practices is increasing in both countries, albeit at different rates and intensities. This research provides an understanding of the evolution of ESG in Southeast Asia's two major economies and their implications for future business practices and policies.*

**Keywords:** *ESG, Corporate Governance, Indonesia, Singapore, Sustainability, Financial Regulation*

### ABSTRAK

Perbandingan antara penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam tata kelola perusahaan di Singapura dan Indonesia. Dalam penelitian ini, metode analisis komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai aspek penerapan ESG di kedua negara, termasuk perbedaan dalam kerangka regulasi dan kesadaran perusahaan terkait ESG, peran pemerintah dan regulasi, tantangan yang dihadapi perusahaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi dan tingkat kesadaran perusahaan di Singapura lebih baik daripada di negara lain. Meskipun demikian, adopsi praktik ESG meningkat di kedua negara, meskipun dengan tingkat dan intensitas yang berbeda. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang evolusi ESG di dua ekonomi utama Asia Tenggara dan implikasinya untuk praktik dan kebijakan bisnis di masa depan.

**Kata Kunci:** *ESG, Tata Kelola Perusahaan, Indonesia, Singapura, Keberlanjutan, Regulasi Keuangan*

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam manajemen perusahaan telah berkembang pesat. Sebagai standar yang menilai tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, ESG merupakan komponen penting dalam menentukan keberlanjutan jangka panjang suatu organisasi. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG dalam operasional dan tata kelolanya dianggap lebih responsif terhadap tuntutan pasar yang semakin mengutamakan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dan dampak sosial.

Prinsip ESG bukan hanya merupakan pendekatan untuk menjaga reputasi perusahaan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investor global. Investasi yang bertanggung jawab kini menjadi prioritas, terutama bagi investor institusi besar yang ingin memastikan bahwa mereka menanamkan modal pada perusahaan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran publik dan konsumen terhadap isu-isu seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, serta pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Sebagai pusat bisnis dan keuangan Asia Tenggara, Singapura telah berkontribusi besar dalam mendorong penerapan ESG dalam tata kelola perusahaan. Sebagai bagian dari transparansi perusahaan, perusahaan yang terdaftar harus melaporkan kinerja ESG mereka, menurut *Monetary Authority of Singapore* (MAS) dan *Singapore Exchange* (SGX). Singapura menyadari bahwa penerapan ESG meningkatkan daya saing perusahaan di tingkat Internasional dan membantu masyarakat luas. Banyak perusahaan multinasional dan lokal yang berkantor di Singapura telah memasukkan ESG ke dalam strategi bisnis mereka sebagai bagian dari strategi ekonomi Singapura yang berpusat pada keberlanjutan (*sustainability*). Negara ini dikenal memiliki pendekatan yang holistik terhadap penerapan ESG, yang didukung oleh peraturan yang ketat dan kesadaran sektor swasta yang tinggi.

Di sisi lain, berbagai masalah menghadang implementasi prinsip ESG di Indonesia, yang masih dalam tahap awal. Meskipun ESG awalnya diadopsi oleh beberapa perusahaan besar, terutama perusahaan publik, implementasinya masih terbatas dan bervariasi secara kualitas. Banyak perusahaan, terutama yang berskala kecil hingga menengah, sering kali mengabaikan aspek ESG lainnya seperti tata kelola (*governance*) dan dampak lingkungan, meskipun undang-undang telah menetapkan bahwa perusahaan di Indonesia harus melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Selain tekanan dari pemangku kepentingan global dan masuknya investasi asing yang memerlukan standar ESG, perusahaan Indonesia mulai memperhatikan pelaksanaan dan pengawasan penerapan ESG karena peraturan lingkungan dan transparansi perusahaan di Indonesia belum seketat di Singapura.

Perbedaan konteks ini menunjukkan kesulitan dan peluang yang berbeda bagi masing-masing negara. Indonesia, yang memiliki banyak sumber daya alam, menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan, sementara Singapura, yang lebih kecil, harus memprioritaskan inovasi dan efisiensi untuk menjaga keberlanjutan bisnisnya.

Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan prinsip ESG dalam corporate governance sangat penting untuk membandingkan Singapura dan Indonesia. Peraturan, budaya bisnis, dan kesadaran publik yang berbeda akan mempengaruhi cara masing-masing negara mengelola tantangan keberlanjutan.

Selain itu, perbandingan ini memberikan gambaran tentang bagaimana pendekatan perusahaan dalam mengadopsi ESG dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tekanan investor, dan tuntutan pasar.

Singapura, yang telah menerapkan kebijakan ESG dengan baik, dapat menjadi model yang relevan bagi Indonesia yang sedang berusaha untuk memperkuat tata kelola perusahaan berbasis keberlanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*) di Indonesia dan Singapura dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu regulasi, budaya bisnis, serta tingkat kesadaran perusahaan terhadap pentingnya keberlanjutan.

Dari segi regulasi dan kebijakan pemerintah, Singapura memiliki kebijakan yang lebih ketat dan terstruktur dibandingkan Indonesia. Pemerintah Singapura, melalui lembaga seperti *Monetary Authority of Singapore (MAS)* dan *Singapore Exchange (SGX)*, telah menerapkan kewajiban pelaporan keberlanjutan sejak tahun 2016. Kebijakan ini mendorong perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa untuk lebih transparan dalam melaporkan kinerja mereka terkait ESG. Singapura juga memprioritaskan ekonomi berbasis keberlanjutan melalui kebijakan seperti *Green Finance Action Plan*, yang menekankan pentingnya integrasi ESG dalam seluruh sektor ekonomi. Sementara itu, di Indonesia, penerapan ESG mulai berkembang, terutama sejak keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 yang mengatur keuangan berkelanjutan. Regulasi ini mewajibkan perusahaan publik untuk melaporkan kinerja keberlanjutan mereka, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman mendalam tentang ESG dan penegakan regulasi yang belum optimal.

Perbedaan lainnya dapat dilihat dari tingkat kesadaran perusahaan terhadap ESG. Di Singapura, perusahaan lebih proaktif dalam mengadopsi prinsip-prinsip ESG, didorong oleh tekanan dari investor internasional dan kebutuhan untuk mempertahankan daya saing di pasar global. Singapura, sebagai pusat keuangan dunia, menghadapi ekspektasi yang tinggi dari investor global yang mengedepankan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan mereka. Di sisi lain, di Indonesia, sebagian besar perusahaan, terutama yang berskala kecil hingga menengah, masih menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan secara signifikan. Meskipun perusahaan besar di sektor-sektor strategis seperti energi dan keuangan, misalnya PT Pertamina dan PT Bank Rakyat Indonesia, telah mulai merespons tuntutan investor dengan menerapkan pelaporan ESG, kesenjangan dalam penerapan di berbagai jenis perusahaan masih cukup lebar.

Budaya bisnis juga mempengaruhi penerapan ESG di kedua negara ini. Di Singapura, budaya bisnis lebih mengutamakan standar internasional dan kepatuhan terhadap regulasi global, yang menjadikan ESG sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan. Investor yang berinvestasi di perusahaan Singapura umumnya memiliki ekspektasi tinggi terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ESG, dan perusahaan yang tidak mematuhi standar ini berisiko kehilangan akses ke pasar modal. Di Indonesia, adopsi ESG lebih lambat, meskipun pengaruh investor asing mulai terlihat. Tekanan dari investor global yang menuntut praktik keberlanjutan mulai mempengaruhi perusahaan Indonesia, namun banyak yang masih menganggap ESG sebagai kewajiban administratif daripada strategi bisnis inti.

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ESG di Indonesia dan Singapura meliputi regulasi pemerintah, kesadaran perusahaan, ketersediaan sumber daya, dan dukungan dari investor global;

### 1. Regulasi Pemerintah:

Regulasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan penerapan ESG di Singapura. Pemerintah dan lembaga pengawas, seperti MAS dan SGX, sangat berperan dalam mendorong perusahaan untuk mematuhi standar ESG. Perusahaan yang tidak patuh dapat menghadapi sanksi atau pengurangan akses terhadap pendanaan. Di Indonesia, regulasi terkait ESG masih dalam tahap perkembangan. Meskipun OJK telah mengeluarkan kebijakan terkait keuangan berkelanjutan, tantangan utamanya adalah kurangnya penegakan yang efektif di lapangan. Banyak perusahaan yang hanya melaporkan ESG sebagai formalitas tanpa benar-benar mengimplementasikan praktik yang berkelanjutan.

## 2. Tekanan dari Investor:

Di Singapura, investor memainkan peran besar dalam mendorong adopsi ESG. Investor institusi besar seperti *sovereign wealth funds* dan lembaga investasi internasional seringkali menetapkan standar ESG yang tinggi bagi perusahaan tempat mereka berinvestasi. Di Indonesia, tren serupa mulai muncul, terutama dari investor asing yang menuntut transparansi dan keberlanjutan. Namun, investor domestik belum memberikan tekanan yang sama besar terhadap penerapan ESG.

## 3. Kesadaran Publik dan Budaya Perusahaan:

Kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial di Singapura lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Pemerintah Singapura secara aktif mengedukasi masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya keberlanjutan, dan hal ini didukung oleh budaya perusahaan yang sangat responsif terhadap perubahan global. Di Indonesia, kesadaran publik terkait ESG masih rendah. Banyak perusahaan belum menganggap ESG sebagai bagian dari strategi bisnis inti mereka, melainkan hanya sebagai kewajiban regulasi atau CSR.

## 4. Sumber Daya dan Infrastruktur:

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ESG adalah ketersediaan sumber daya. Di Singapura, meskipun negara ini memiliki sumber daya alam yang terbatas, fokus pada inovasi dan teknologi hijau membantu perusahaan untuk lebih mudah mengadopsi praktik ESG. Sebaliknya, di Indonesia, tantangan infrastruktur dan kurangnya teknologi ramah lingkungan masih menjadi kendala besar bagi perusahaan yang ingin mengadopsi ESG.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, jelas bahwa Singapura memiliki kerangka kerja yang lebih matang untuk mendukung implementasi ESG, sementara Indonesia masih berada dalam tahap perkembangan dengan tantangan yang lebih besar.

Peran pemerintah dan regulasi dalam memfasilitasi adopsi ESG dalam tata kelola perusahaan di Indonesia dan Singapura menunjukkan pendekatan yang berbeda namun progresif.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah signifikan dengan mengeluarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi ini tidak hanya mewajibkan perusahaan terbuka untuk menyusun dan menerbitkan laporan keberlanjutan, tetapi juga mendorong integrasi aspek ESG ke dalam strategi bisnis jangka panjang. OJK juga telah meluncurkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang menekankan pentingnya inovasi produk keuangan berkelanjutan dan peningkatan awareness serta kapasitas pelaku industri jasa keuangan.

Lebih lanjut, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengambil inisiatif dengan meluncurkan indeks ESG Leaders (ESG-L) pada tahun 2020. Indeks ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan dengan kinerja ESG yang baik, sekaligus mendorong emiten untuk meningkatkan praktik ESG mereka.

Sementara itu, Singapura mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Monetary Authority of Singapore (MAS) telah meluncurkan Green Finance Action Plan pada tahun 2019, yang mencakup berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan ekosistem keuangan terhadap risiko lingkungan, mengembangkan pasar dan solusi keuangan hijau, serta memanfaatkan teknologi dan inovasi.

MAS juga bekerja sama dengan Singapore Exchange (SGX) untuk meningkatkan standar pengungkapan ESG. Mulai tahun 2022, semua emiten diwajibkan untuk menyusun laporan keberlanjutan sesuai dengan rekomendasi Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), dengan penekanan khusus pada pengungkapan terkait iklim. Selain itu, pemerintah Singapura telah meluncurkan Singapore Green Plan 2030, sebuah peta jalan nasional menuju pembangunan berkelanjutan yang juga mencakup aspek keuangan hijau.

Tantangan yang dihadapi perusahaan di kedua negara dalam menerapkan ESG juga beragam dan kompleks. Di Indonesia, salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas teknis dalam mengimplementasikan praktik ESG. Banyak perusahaan, terutama yang berukuran menengah dan kecil, masih menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam strategi bisnis mereka. Hal ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap data ESG yang berkualitas dan konsisten, serta kurangnya standarisasi dalam pengukuran dan pelaporan kinerja ESG.

Selain itu, perusahaan Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal pendanaan untuk inisiatif ESG. Meskipun ada peningkatan minat investor terhadap investasi berkelanjutan, banyak perusahaan masih kesulitan untuk mengakses pembiayaan yang diperlukan untuk transformasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Di Singapura, meskipun kesadaran akan ESG relatif lebih tinggi, perusahaan masih menghadapi tantangan dalam hal standarisasi pelaporan ESG. Keberagaman standar dan kerangka kerja pelaporan yang ada sering kali menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam membandingkan kinerja ESG antar perusahaan. Perusahaan juga menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan tujuan jangka pendek dengan investasi jangka panjang yang diperlukan untuk transformasi ESG.

Tantangan lain yang dihadapi perusahaan di Singapura adalah kebutuhan untuk mengembangkan keahlian internal dalam manajemen risiko ESG. Dengan meningkatnya kompleksitas isu-isu ESG, perusahaan dituntut untuk memiliki tim yang mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko terkait ESG secara efektif. Meskipun demikian, kedua negara terus berupaya meningkatkan adopsi ESG. Indonesia telah meluncurkan Indonesian Green Taxonomy pada tahun 2022 untuk memberikan panduan yang lebih jelas bagi sektor keuangan dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan aktivitas ekonomi berkelanjutan. Taxonomy ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku pasar dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan berkelanjutan.

Sementara itu, Singapura terus memperkuat kerangka regulasinya, termasuk dengan pengenalan kewajiban pengungkapan terkait iklim berbasis TCFD untuk perusahaan terbuka mulai tahun 2023. MAS juga telah mengumumkan rencana untuk menerbitkan panduan tentang manajemen risiko lingkungan bagi lembaga keuangan, yang mencakup aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target.

Kedua negara juga aktif dalam mendorong kolaborasi regional dan internasional dalam isu ESG. Indonesia, sebagai presidensi G20 pada tahun 2022, telah menempatkan pembiayaan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas utama. Sementara itu, Singapura terus memposisikan dirinya sebagai hub keuangan hijau di Asia, dengan berbagai inisiatif untuk menarik investasi dan mengembangkan keahlian dalam bidang keuangan berkelanjutan.

Kesadaran dan respons perusahaan terhadap tekanan investor terkait ESG di Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan yang signifikan, meskipun kedua negara mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, kesadaran perusahaan terhadap ESG telah meningkat, namun masih tertinggal dibandingkan Singapura. Menurut survei yang dilakukan oleh PwC Indonesia pada tahun 2022, sekitar 78% perusahaan Indonesia menyatakan bahwa ESG merupakan prioritas tinggi bagi mereka. Namun, hanya 52% yang telah mengintegrasikan ESG ke dalam strategi bisnis mereka.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peningkatan jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Pada tahun 2019, hanya 94 perusahaan terbuka yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Angka ini meningkat menjadi 168 perusahaan pada tahun 2020, dan mencapai 221 perusahaan pada tahun 2021. Meskipun tren ini positif, masih ada kesenjangan yang signifikan mengingat total emiten di Bursa Efek Indonesia mencapai lebih dari 700 perusahaan. Respons perusahaan Indonesia terhadap tekanan investor terkait ESG juga mulai terlihat. Beberapa perusahaan besar, seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), telah mengambil langkah proaktif dalam mengadopsi praktik ESG. BBRI, misalnya, telah menerbitkan green bond senilai Rp 5 triliun pada tahun 2019, yang merupakan green bond pertama dari bank BUMN di Indonesia.

Sementara itu, di Singapura, kesadaran dan respons perusahaan terhadap ESG jauh lebih maju. Menurut survei KPMG pada tahun 2022, 89% perusahaan terbuka di Singapura telah mengintegrasikan ESG ke dalam strategi bisnis mereka. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Singapore Exchange (SGX) melaporkan bahwa pada tahun 2021, 99.5% dari perusahaan terbuka di Singapura telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap persyaratan pengungkapan ESG. Respons perusahaan Singapura terhadap tekanan investor terkait ESG juga lebih proaktif. Misalnya, DBS Bank, salah satu bank terbesar di Asia Tenggara, telah berkomitmen untuk mencapai net-zero emissions pada tahun 2050 dan telah mengalokasikan SGD 50 miliar untuk pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan pada tahun 2024.

Dalam hal kinerja ESG, perusahaan-perusahaan Singapura umumnya mendapatkan peringkat yang lebih baik dibandingkan perusahaan Indonesia. Menurut data dari MSCI ESG Ratings pada tahun 2022, 22% perusahaan Singapura yang termasuk dalam MSCI Singapore Index mendapatkan peringkat AAA atau AA (peringkat tertinggi), sementara hanya 5% perusahaan Indonesia dalam MSCI Indonesia Index yang mencapai peringkat tersebut.

Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, Singapura memiliki ekosistem keuangan yang lebih matang dengan investor institusional yang lebih aktif dalam mendorong agenda ESG. Kedua, regulasi di Singapura terkait pengungkapan ESG lebih ketat dan telah diterapkan lebih awal dibandingkan Indonesia. Namun, kesenjangan ini mulai menyempit. Di Indonesia, tekanan investor terkait ESG semakin meningkat. Survei Bank Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 72% investor asing mempertimbangkan faktor ESG dalam keputusan investasi mereka di Indonesia. Hal ini mendorong perusahaan Indonesia untuk lebih serius dalam menangani isu-isu ESG.

Selain itu, inisiatif seperti *ESG Leaders Index* yang diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 telah memberikan insentif tambahan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja ESG mereka. Pada akhir tahun 2022, indeks ini telah mencakup 30 perusahaan dengan kinerja ESG terbaik di Indonesia. Di sisi lain, meskipun Singapura lebih maju dalam implementasi ESG, perusahaan-perusahaan di sana juga menghadapi tantangan. Survei KPMG menunjukkan bahwa 62% perusahaan Singapura masih kesulitan dalam mengukur dan melaporkan metrik ESG secara akurat.

## KESIMPULAN

Analisis perbandingan penerapan prinsip ESG dalam tata kelola perusahaan di Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua negara. Singapura memperlihatkan tingkat adopsi dan integrasi ESG yang lebih tinggi dalam praktik bisnis, didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, tekanan dari investor global, kesadaran publik yang tinggi, serta ketersediaan sumber daya dan infrastruktur pendukung yang memadai. Peran pemerintah dan regulasi terbukti sangat penting dalam mendorong adopsi ESG, dengan Singapura menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dibandingkan Indonesia.

Meskipun demikian, perusahaan di kedua negara masih menghadapi tantangan dalam implementasi ESG, termasuk kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas dalam pengukuran serta pelaporan kinerja ESG. Kesadaran dan respons perusahaan terhadap tekanan investor terkait ESG menunjukkan peningkatan di kedua negara, namun Singapura memiliki tingkat kematangan yang lebih tinggi dalam hal ini.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, kedua negara menunjukkan tren positif dalam adopsi praktik ESG. Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga dari pengalaman Singapura dalam mengembangkan kerangka regulasi yang lebih kuat dan meningkatkan kesadaran perusahaan. Di sisi lain, Singapura perlu terus berinovasi untuk mengatasi tantangan dalam standarisasi dan pengukuran kinerja ESG. Ke depan, kolaborasi regional dan internasional akan menjadi kunci dalam mendorong adopsi ESG yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam kecepatan dan intensitas adopsi ESG, baik Indonesia maupun Singapura berada pada jalur yang tepat menuju integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam tata kelola perusahaan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- Monetary Authority of Singapore (MAS). (2018). Guidance on Sustainability Reporting for Listed Companies.
- Singapore Exchange (SGX). (2016). Sustainability Reporting Guide.
- International Finance Corporation (IFC). (2012). Performance Standards on Environmental and Social Sustainability.
- Green Finance Action Plan. (2020). Monetary Authority of Singapore.
- Jalal, M. (2020). Corporate Social Responsibility in Indonesia: Policies, Practices and the Role of Stakeholders. *Journal of Cleaner Production*, 265, 121739.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). Laporan Penilaian Implementasi Prinsip CSR di Indonesia
- World Bank. (2020). ESG Disclosures and Financial Performance.
- Amran, A., & Ooi, S. K. (2014). Corporate Social Responsibility and Firm Performance in Malaysia. *International Journal of Business and Management*, 9(7), 68-78.
- Gonzalez, M. E., & Mena, M. (2019). Corporate Governance and Sustainability: The Role of Institutional Investors. *Corporate Governance: An International Review*, 27(4), 299-310.
- Securities and Exchange Board of India (SEBI). (2012). The Corporate Governance Voluntary Guidelines.
- Hassan, M. K., & Shaban, M. (2019). Corporate Governance and Sustainability: A Global Perspective. *International Journal of Business and Management*, 14(3), 1-15.